

Pendorong dan Penghambat Deforestasi di Desa Tepi Hutan di Papua

Sepus M. Fatem, Dosen di Fakultas Kehutanan UNIPA

Hutan Papua menutupi wilayah 42.224.880 hektare atau 95 persen dari daratan Papua.¹ Dari luasan tutupan hutan itu, 40.546.360 hektare atau 96 persen merupakan kawasan hutan dan 1.678.480 hektare, atau 4 persen merupakan kawasan perairan.² Kawasan hutan tersebut terbagi dalam dua wilayah provinsi: Papua dan Papua Barat. Saat ini, kawasan hutan di Papua seluas 30.387.499 hektare,³ sementara kawasan hutan di Papua Barat seluas 9.361.076 hektare.⁴

Data Laboratorium GIS Fakultas Kehutanan Universitas Papua menyatakan deforestasi di Papua Barat hingga 2018 mencapai luasan 152.373 hektare, sementara degradasi hutan mencapai 2.088.278 hektare. Kajian ini mempelajari faktor-faktor pendorong deforestasi dan degradasi hutan untuk mencari pendekatan alternatif bagi mitigasi menyusutnya tutupan hutan.

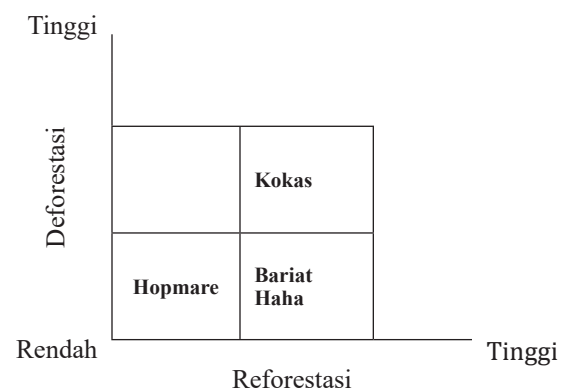
Pada saat yang sama, ada kecenderungan meningkatnya tutupan lahan di beberapa lokasi di Papua Barat. Kondisi ini memberi kesempatan untuk meningkatkan tutupan hutan atau reforestasi. Fenomena ini mengarah adanya transisi hutan. Transisi hutan menunjukkan pola dinamis tutupan hutan: dari deforestasi menuju reforestasi. Transisi hutan itu terjadi karena adanya perubahan kebijakan pengelolaan hutan dan modal sosial masyarakat adat setempat.

1. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 891/Kpts-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Provinsi Papua.
2. Dinas Kehutanan Provinsi Papua, 2004.
3. Surat Keputusan Menteri Kehutanan 782/Menhut-II/2012.
4. Keputusan Menteri Kehutanan No. 783/2014.

Tim Fakultas Kehutanan UNIPA dan Samdhana Institute melakukan penelitian pada Maret – Agustus 2020 untuk memperoleh pola transisi hutan dan memahami faktor yang memicu dan mencegah transisi hutan. Penelitian mengkaji empat kampung di tiga kabupaten di Papua Barat: Hopmare, Kabupaten Tambrauw; Haha dan Bariat, Kabupaten Sorong Selatan; dan, Kokas, Kabupaten Fakfak. Tujuan penelitian untuk menganalisis kebijakan yang berkaitan dengan perubahan tutupan lahan dan hutan.

Gambar dan tabel berikut menunjukkan pola transisi hutan di empat wilayah penelitian.

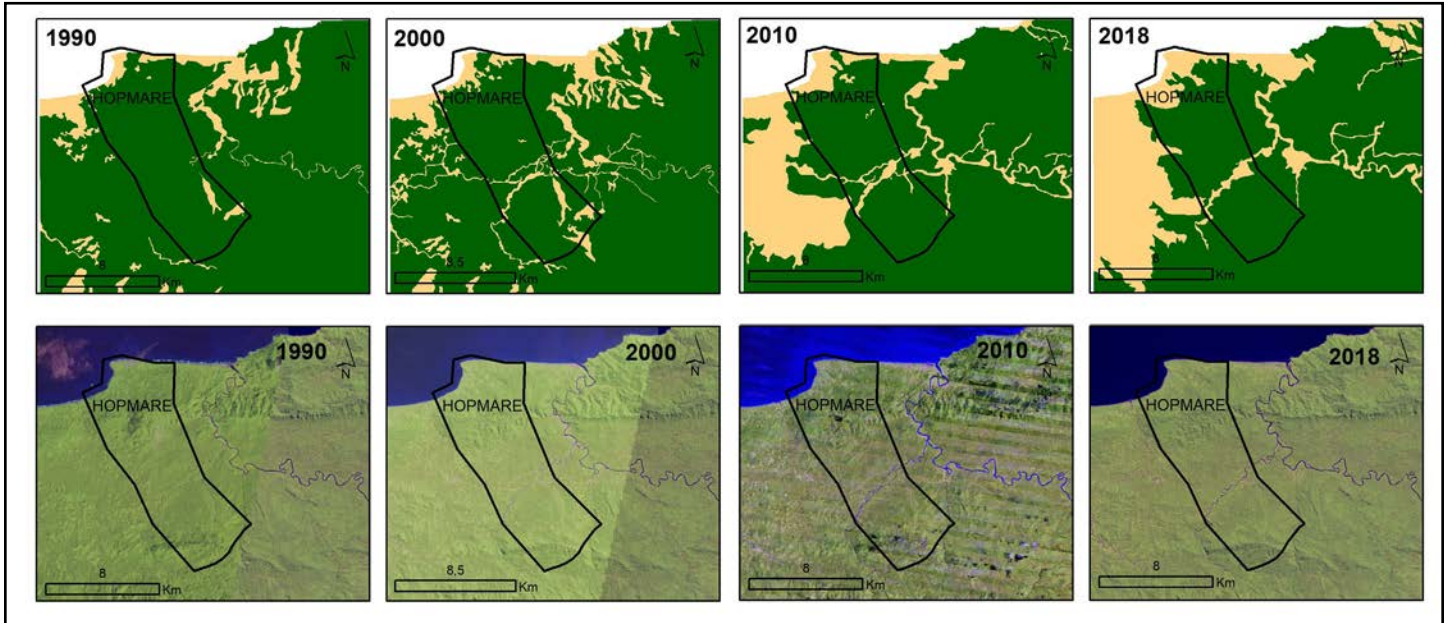
Gambar 1. Tipologi transisi hutan di empat lokasi penelitian.



Tabel 1. Tutupan lahan di Desa Hopmare, Kabupaten Tambraw

Tahun	Hutan (ha)	ha/tahun	%/tahun
1990	7,268.56		
2000	6,778.05	- 49.05	0.008
2010	6,841.57	6.35	- 0.001
2018	6,543.16	- 37.30	0.005

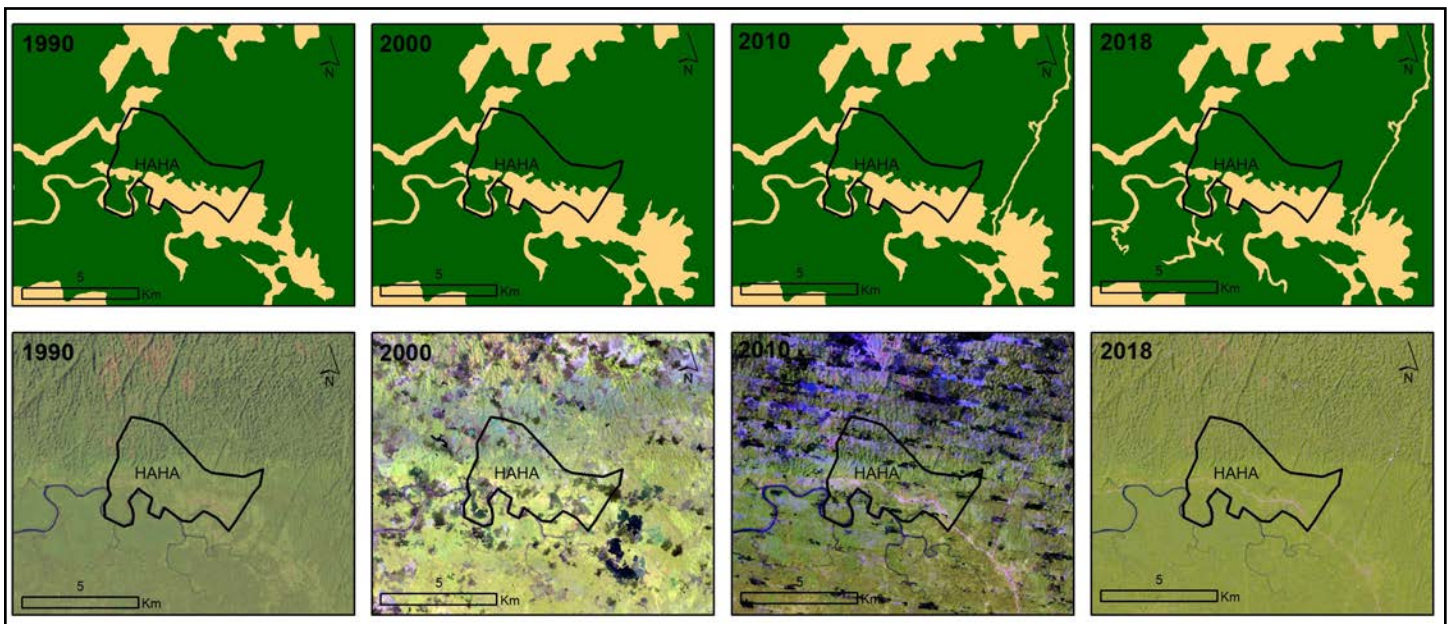
Gambar 2. Tutupan lahan di Desa Hopmare, Kabupaten Tambraw



Tabel 2. Tutupan lahan di Desa Haha, Kabupaten Dorong Selatan

Tahun	Hutan (ha)	ha/tahun	%/tahun
1990	1,171.31		
2000	1,171.31	-	-
2010	1,171.31	-	-
2018	1,171.31	-	-

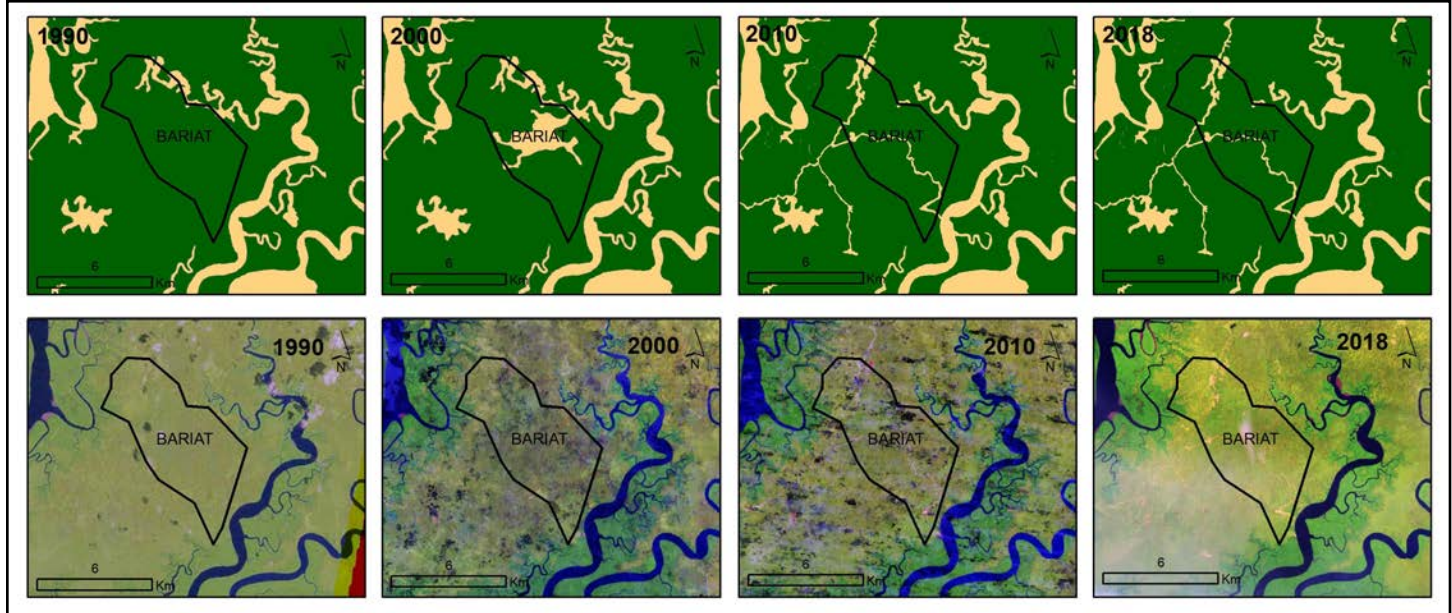
Gambar 3. Tutupan lahan di Desa Haha, Kabupaten Dorong Selatan



Tabel 3. Tutupan lahan di Desa Bariat, Kabupaten Sorong Selatan

Tahun	Hutan (ha)	ha/tahun	%/tahun
1990	3.169,40		
2000	2.699,98	- 46,94	0,015
2010	3.063,94	36,40	- 0,013
2018	3.063,94	-	-

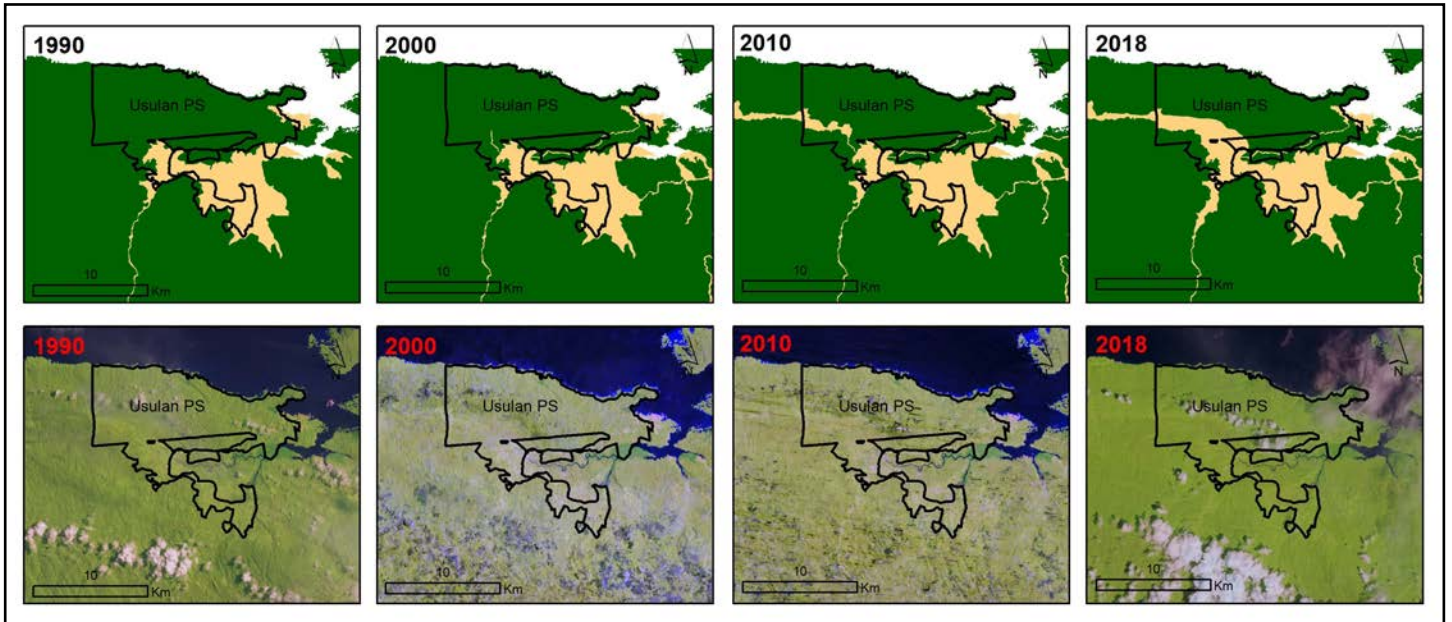
Gambar 4. Tutupan lahan di Desa Bariat, Kabupaten Sorong Selatan



Tabel 4. Tutupan lahan di Desa Kokas, Kabupaten Fakfak

Tahun	Hutan (ha)	ha/tahun	%/tahun
1990	10.098,32		
2000	9.996,79	- 10,15	0,001
2010	9.656,58	- 34,02	0,003
2018	8.919,77	- 92,10	0,010

Gambar 5. Tutupan lahan di Desa Kokas, Kabupaten Fakfak



Tabel 5. Tutupan lahan non-hutan di 4 area penelitian

Tutupan lahan non-hutan	Hopmare		Haha		Bariat		Kokas	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Badan air	3	1.5	22	43.1	1,235	95.4	7	2.7
Lahan yang dibangun	13	6.4	17	33.3	20	1,5	74	28.7
Lahan terbuka	19	9.4	4	7.8	28	2.2	8	3.1
Kebun	27	13.3	2	3.9	-	-	-	-
Lahan rumput	-	-	-	-	11	0.9	2	0.8
Semak	141	69.5	6	11.8			167	64.7
Total	203	100	51	100	1,294	100	258	100

Hasil penelitian menunjukkan ada beberapa indikasi pendorong deforestasi di empat area kajian:

- Pembukaan kebun/ladang berpindah

Perladangan berpindah menjadi salah satu pendorong deforestasi dan degradasi hutan. Meski hal ini masih menjadi perdebatan, hasil penelitian ini menyimpulkan perladangan berpindah di tiga lokasi menjadi pemicu deforestasi. Bentuknya terlihat dari aktivitas masyarakat dalam membuka lahan hutan untuk ditanami berbagai jenis tanaman. Aktivitas ini dilakukan berulang-ulang di lahan yang sama dengan durasi waktu yang berbeda-beda.

- Pemekaran kampung

Salah satu dampak negatif alokasi dana desa, dari kebijakan pemerintah pusat, adalah deforestasi dan degradasi hutan. Untuk memperoleh alokasi dana, setiap desa harus memenuhi persyaratan administratif. Salah satunya adalah lokasi desa. Syarat pencairan dana ini mendorong euforia membentuk desa baru melalui pembukaan lahan hutan sebagai lokasi desa baru. Pembukaan lahan hutan untuk desa baru merupakan salah satu temuan penelitian yang memicu deforestasi.

- Pembangunan infrastruktur jalan

Kebijakan dana desa bukan hanya berdampak pembukaan lahan hutan, namun juga disertai dengan pembangunan infrastruktur pendukung: jalan, jembatan, perumahan dan fasilitas lain. Seluruh infrastruktur ini memerlukan ruang, lahan, dan bahan bangunan yang mendorong penggunaan kayu dan hutan sebagai sumber utama pembangunan. Penelitian menemukan pembangunan infrastruktur desa menyebabkan deforestasi dan degradasi hutan.



Sementara itu, kajian juga melihat adanya penghambat deforestasi di empat area penelitian:

- Tidak ada operasi perusahaan hutan skala besar

Hingga saat ini, penelitian mencatat masih ada izin sah untuk eksploitasi kayu skala besar. Hanya saja, operasi di lapangan belum atau tidak dilakukan oleh pemegang konsesi. Khusus untuk lokasi kajian Hopmare, Tambrau, secara umum desa ini merupakan hutan bekas tebangan konsesi PT Multiwahana Wijaya. Di Hopmare, penelitian menyediakan catatan awal bahwa tidak ada aktivitas perusahaan yang secara signifikan berdampak pada deforestasi dan degradasi hutan, baik pembukaan lahan untuk fasilitas perusahaan maupun aktivitas produksi, seperti penebangan.



- Sistem pertanian yang mendukung konservasi hutan

Secara umum, sistem pertanian bersifat tradisional. Sistem ini mendorong masyarakat membuka kebun untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Di beberapa lokasi, sepertinya sistem ini mendorong masyarakat melakukan pembersihan lahan untuk membuka kebun, tapi tetap meninggalkan pohon-pohon tertentu untuk konservasi tanah dan iklim lokal. Masyarakat juga menanam beberapa jenis pohon bernilai ekonomi yang memberi manfaat untuk reforestasi. Contohnya, durian (*Durio zibethinus*), langsung (*Lansium domesticum*), dan rambutan (*Nephelium lappaceum*).

- Pengelolaan dana desa

Kebijakan pemerintah dalam alokasi dana desa memberi dampak ganda. Penelitian ini menunjukkan indikasi awal bahwa dana desa membuat masyarakat menghabiskan lebih banyak waktu untuk membangun rumah dan infrastruktur desa. Artinya, dengan kata lain, dana desa mengalihkan frekuensi kegiatan masyarakat di hutan. Dengan demikian, penelitian ini menyarankan pengelolaan dana desa bisa mengalihkan perhatian masyarakat untuk berkonsentrasi di desa, sehingga kegiatan lainnya, termasuk pembukaan hutan, semakin berkurang.

Implikasi Kebijakan

Penelitian menunjukkan perlunya intervensi kebijakan pemerintah di tingkat kabupaten dan provinsi baik untuk strategi adaptasi dan mitigasi deforestasi. Strategi mitigasi dapat dilakukan dengan seleksi ketat pengajuan pembentukan desa baru. Salah satunya, pentingnya kriteria dan indikator dalam pembentukan desa baru yang mencakup aspek keberlanjutan dan dampak lingkungan. Di sisi lain, strategi adaptasi dapat dilakukan melalui kebijakan yang mendorong kewajiban melakukan reforestasi sebagai syarat izin membentuk desa baru.

Reforestasi memang ditemukan di tiga area penelitian. Di Bariat, reforestasi ditandai dengan tidak adanya penebangan pohon damar oleh masyarakat. Di Desa Haha, keberadaan dusun sagu tetap dipertahankan bahkan masyarakat menanam pohon sagu untuk menggantikan pohon yang ditebang. Di Desa Kokas, reforestasi dilakukan melalui penanaman pohon pala oleh masyarakat, baik di lahan keluarga maupun di hutan negara. Wanatani pala merupakan sumber pendapatan utama bagi hampir seluruh masyarakat di Kokas.



Reforestasi hanya bisa dilakukan jika pemerintah mengembangkan strategi yang bersinergi dengan modal sosial masyarakat. Modal sosial yang dimaksud adalah nilai kearifan lokal. Seperti, menanam dan tidak menebang pohon di tepi sungai, ataupun tidak menebang pohon secara sembarangan. Atau, mempertahankan daerah sakral yang menjadi simbol atau identitas masyarakat dan kearifan lokal lain yang relevan.

Nilai kearifan lokal menjadi kekuatan untuk menurunkan deforestasi dan degradasi sumber daya alam. Nilai kearifan lokal yang telah hilang atau diabaikan perlu dieksplorasi dan dikembangkan kembali untuk mendukung reforestasi dan konservasi lingkungan.

Konservasi normatif yang bersinergi dengan modal sosial dipercaya dapat memberikan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam. Penelitian ini menyarankan modal sosial di area kajian dan area lainnya dapat menggunakan kearifan lokal sebagai salah satu kekuatan dalam mencegah deforestasi dan degradasi hutan.

Data penelitian ini masih harus diuji lapangan lebih lanjut untuk dapat memastikan keabsahan data wawancara, studi pustaka, dan analisis citra satelit. Hal ini penting untuk dapat mempromosikan kebijakan perlindungan sumber daya hutan dan mencegah kehilangan hutan yang lebih besar akibat faktor politik dan kebijakan pembangunan.